

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1: Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Arief, Barda Nawawi. *RUU KUHP Baru: Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister, 2022.
- Amiruddin and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Cross, Rupert. *Precedent in English Law*. Edited by J. W. Harris. England, 1991.
- Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017.
- Hiariej, Eddy O. S., dan Topo Santoso. *Anotasi KUHP Nasional*. Depok: Rajawali Pers, 2025.
- Lilik Mulyadi. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan: Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Korban Kejahatan*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2002.

- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana: Komentor atas Pasal-Pasal Terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Sudarto. *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*. Semarang: Yayasan Sudarto, 2018.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Tirtaamidjaja. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Fasco, 1955.
- Tomalili Rahmanuddin. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017.
- Warmin. “*Ratio Decidendi* Hakim dalam Memutus Perkara Tanah Ditelantarkan Ditinjau dari Perspektif Keadilan Hukum (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2899 K/Pdt/2018).” *Mizanuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2023): 40.

Jurnal

Ardiansyah, M. Rico, dan Ibrahim Fikma Edrisy. "Tinjauan Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia dalam KUHP Baru." *Journal Evidence of Law*.

Atila Amalia Bachmid, Suwitno Y. Imran, and Avelia Rahmah. "Penegakan Hukum dan Penerapan *Restorative Justice* Pada Kasus Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 6, no. 3 (2025): 876.

Bachmid, Atila Amalia, Suwitno Y. Imran, dan Avelia Rahmah. "Penegakan Hukum dan Penerapan Restorative Justice pada Kasus Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 6, no. 3 (2025).

Cahyani, Regita, dan Hasna Afifah. "Implementasi Teori Retributif dalam Penjatuhan Pidana Mati Kasus Mutilasi Wanita di Malang." *Jurnal Al-Zayn* 3, no. 6 (2025).

Fadli, Wan Ferry, dan Diki Zukriadi. "Konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) dalam Putusan Hakim." *Jurnal Al-Zayn* 3, no. 6 (2025).

Fadli, Wan Ferry, M. Musa, dan Kasmanto Rinaldi. "*The Existence and Application of the Principle of Judge's Forgiveness (Rechterlijk Pardon/Judicial Pardon) in Criminal Law and Court Decisions.*" *Journal International of Officium Nobile* 1, no. 1 (2025).

Fajar, Rahul Sang. "Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bukittinggi

- (Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN BKT).” *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 5, no. 05 (September 2025).
- Frensius Widi Hartono, Andika Wijaya, and Satriya Nugraha. “Judicial Pardon sebagai Wujud Humanisasi Pemidanaan dalam KUHP 2023.” *Journal of Innovative and Creativity* 5, no. 3 (2025): 28851.
- F. Widi Hartono, Andika Wijaya, and Satriya Nugraha. “Judicial Pardon sebagai Wujud Humanisasi Pemidanaan dalam KUHP 2023.” *Journal of Innovative and Creativity* 5, no. 3 (2025): 28851.
- Hariza, M. Gibran, dan Syarif Nurhidayat. “Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana dalam Konsep Pemaafan Hakim (Perbandingan antara Hukum Pidana Indonesia dengan Belanda).” *Journal UII*.
- Hartono, Frensius Widi, Andika Wijaya, dan Satriya Nugraha. “Judicial Pardon sebagai Wujud Humanisasi Pemidanaan dalam KUHP 2023.” *Journal of Innovative and Creativity* 5, no. 3 (2025).
- Hasibuan, Sahat Marisi. “Kebijakan Formulasi *Rechterlijke Pardon* dalam Pembaruan Hukum Pidana.” *Jurnal Hukum Progresif* 9, no. 2 (2021).
- M. Rico Ardiansyah and Ibrahim Fikma Edrisy. “Tinjauan Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia dalam KUHP Baru.” *Journal Evidence of Law*, no. 1 (2024): 1646.
- Prayogi A. Podomi, Roy M. Moonti, and Ibrahim Ahmad. “Peran Putusan Sela dan Putusan Akhir dalam Mewujudkan Keadilan Prosedural di Pengadilan.” *Jurnal Mahkamah* 2, no. 3 (2025): 126–127.

Regita Cahyani Prasetya and Hasna Afifah. “Implementasi Teori Retributif dalam Penjatuhan Pidana Mati Kasus Mutilasi Wanita di Malang.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 8689–8698.

Regya Jelindo. “Implementasi *Judicial Pardon* dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berbasis Kepastian Hukum.” Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, n.d.

Samanta, Debayan. “Difference between Obiter Dicta and Ratio Decidendi.” *Penacclaims* 15, no. 1 (April 2021).

Warmin. “*Ratio Decidendi* Hakim dalam Memutus Perkara Tanah Ditelantarkan Ditinjau dari Perspektif Keadilan Hukum (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2899 K/Pdt/2018).” *Mizanuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2023).

Peraturan Perundang-Undangan

Wetboek van Strafrecht.

Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie, Staatsblad 1915 No. 732.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dokumen Resmi

Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 412/Pid.B/2025/PN.Grt.

Internet

Lippu, Ivan. "Ide Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon): Sebuah Konsep Baru dalam Rancangan KUHP." Diakses 25 Maret 2026.
<https://rechtsvinding.bphn.go.id/articles/576>.

Lubis, Zulkarnain. "Hakim Bukan Corong Undang-Undang." *MARI News*. Diakses 25 Maret 2026.
<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/hakim-bukan-corong-undang-undang-08r>.

Prasetyo, Aji. "Terbukti Bersalah, PN Muara Enim Terapkan 'Pemaafan' Kasus ABH Pencurian Kabel". Diakses 17 April 2026.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/terbukti-bersalah--pn-muara-enim-terapkan-pemaafan-kasus-abh-pencurian-kabel-lt6961d73a0c2bf/?page=3>.

